



HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu, memiliki suatu cara tertentu dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Cara masyarakat yang telah berlangsung secara berulang-ulang setiap waktu, dari generasi ke generasi berikutnya sehingga membentuk suatu pola pemanfaatan sumberdaya. Dengan kata lain mereka telah menemukan jalan agar dapat tetap hidup pada tempat tersebut. Cara dan pola hidup masyarakat yang telah diterapkan secara turun temurun telah menjadikan karakteristik masyarakat tersebut dalam berinteraksi dengan kawasan hutan.

Karakteristik tersebut bagi sekelompok masyarakat yang menghuni suatu wilayah telah terbukti dapat mengantar mereka untuk tetap hidup sampai saat ini walaupun hanya pada tingkat *subsisten*. Namun di sisi lain yang mungkin tanpa disadari oleh kelompok masyarakat setempat bahwa karakteristik interaksinya itu kemungkinan juga merugikan kepentingan pihak lain. Masyarakat desa sekitar kawasan konservasi tidak luput dari permasalahan ini, yaitu terjadinya benturan antara kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (ekonomi). Berbagai bentuk program yang telah diberikan oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah guna mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan berbagai pendekatan. Namun seringkali program yang diterapkan kurang berhasil mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu penyebab kegagalan program-program pembinaan masyarakat desa selama ini adalah kurangnya informasi tentang interaksi masyarakat dengan kawasan taman nasional dan jenis serta bentuk program ditentukan secara *top down* tanpa melibatkan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan diperoleh data tentang aktivitas masyarakat desa setempat dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya. Aktivitas yang dimaksud adalah bertani dan memanfaatkan hasil hutan serta aktivitas *religijs* dalam bentuk upacara keagamaan. Kegiatan bertani dilakukan di luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan, sedangkan memanfaatkan hasil hutan dilakukan di areal kawasan hutan khususnya kawasan konservasi seperti taman nasional berupa mengambil sumberdaya dalam kawasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Karakteristik Responden

Secara teoritis karakteristik responden antara lain mencakup umur, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga produktif, baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh sebab itu pemahaman tentang karakteristik responden sebagai pengelola sumberdaya alam sangat penting artinya dalam upaya mempelajari interaksinya dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.

Tabel 2 Rara-Rata Umur, Pendidikan dan Jumlah Anggota Keluarga Responden pada Masing-Masing Desa Penelitian.

Desa Contoh	Umur (Tahun)	Tingkat Pendidikan (%)			Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang)
		TSD	SD	SMP	
Pengadangan	40,5 (30-56)	33,3	38,9	27,8	4,72
Loloan	42,4 (30-54)	64,7	29,4	5,9	3,82
Semalun Lawang	44,1 (32-51)	68,4	26,3	5,3	4,16
Rata-Rata	42,3	55,5	31,5	13,0	4,23

Keterangan : Angka di dalam kurung adalah selang umur responden

Umur

Umur dapat mencerminkan kematangan fisik dan mental seseorang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, umur tidak saja dapat mempengaruhi kemampuannya secara fisik, tetapi juga dengan pengalamannya dapat berperan dalam merespon setiap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Semakin tinggi umur seseorang, maka sampai batas umur tertentu (usia produktif) cenderung semakin produktif dan arif dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan.

Berdasarkan umur responden yang ditampilkan pada Tabel 2, dan dengan merujuk pada klasifikasi umur yang digunakan oleh BPS, maka dapat diketahui bahwa responden di tiga desa yang diteliti berada pada umur produktif. Secara lebih rinci dapat dibandingkan rata-rata umur responden sangat bervariasi baik antar desa maupun dalam satu desa. Sedangkan rata-rata umur responden antara satu desa dengan desa lainnya relatif sama, dan rata-rata umur responden dari ketiga desa adalah 42,32 tahun.



Pendidikan

Menurut Suryani *et al.* (1987), tingkat pendidikan sangat menentukan sebagai alat penyampaian informasi kepada orang tentang perubahan dan untuk merangsang penerimaan-penerimaan gagasan baru. Menurut Hadi (1995), dalam studi AMDAL tingkat pendidikan masyarakat dalam hal ini responden sangat berpengaruh terhadap pengetahuannya mengenai sumberdaya alam dan usaha/kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya alam. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi persepsi yang pada gilirannya akan menentukan tipe respon masyarakat terhadap suatu obyek. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah relatif pasrah terhadap kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada dirinya. Makin tinggi tingkat pendidikan dan makin banyak perbendaharaan pengetahuan, maka makin kritis suatu masyarakat berkenaan dengan persepsinya terhadap suatu obyek.

Gambaran mengenai tingkat pendidikan responden di masing-masing desa terlihat pada Tabel 2, menunjukkan betapa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Sebagian besar responden (55,47 %) berada pada level pendidikan tidak tamat SD/tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Sebanyak 31,53% responden tamat SD/ sederajat dan 13,00% tamat SMP/ sederajat.

Tingkat pendidikan responden terbaik pada Desa Pengadangan dengan indikator menyebarnya tingkat pendidikan responden secara merata, sedangkan tingkat pendidikan responden pada Desa Loloan dan Desa Sembalun Lawang relatif sama, masih didominasi pada tingkat tidak tamat SD yakni sebesar 64,7% pada Desa Loloan dan 68,4% pada Desa Sembalun Lawang. Dengan melihat tingkat pendidikan masyarakat seperti ini, maka diperlukan pembinaan yang intensif untuk dapat menanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting pelestarian sumberdaya alam. Rahman (2003), mengemukakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah menjadi faktor utama penghambat upaya penanaman nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keberhasilan pendidikan di pengaruhi oleh faktor lingkungan. Menurut Litbang Dephut (2003), semakin rendah tingkat pendidikan maka perambahan hutan akan semakin meningkat. Data dari monografi Desa Loloan diketahui bahwa sebanyak 20,39%

anak usia sekolah (7-15 thn) tidak sekolah, sedangkan Desa Sembalun Lawang 12% anak usia sekolah telah putus sekolah. Hal ini memberikan gambaran bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di masa yang akan datang.

Jumlah Anggota Keluarga

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan mengurus keperluannya sendiri. Jumlah anggota keluarga adalah seluruh orang yang berada dalam satu rumah tangga dan menjadi tanggungan kepala rumah tangga (BPS 2001). Dengan demikian jumlah anggota keluarga mencerminkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh rumah tangga untuk memberikan kehidupan yang layak.

Hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan daya dukung lingkungan sangat erat. Jika jumlah anggota keluarga meningkat akan disertai dengan meningkatnya kebutuhan, maka dapat dipastikan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan akan terus meningkat, akibatnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan akan semakin menurun. Data pada Tabel 2, menunjukkan rata-rata jumlah anggota keluarga responden cukup tinggi yaitu 4,23 jiwa/kepala keluarga. Jika dikaitkan dengan rata umur responden yang masih usia subur dan dengan asumsi tidak mengikuti program keluarga berencana (KB), maka diperkirakan jumlah anggota keluarga akan terus bertambah yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah penduduk. Suparmoko (1989) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, barang dan jasa, serta sumberdaya alam sebagaimana digambarkan berikut ini.





Gambar 3 Hubungan antara Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Barang Sumberdaya Alam dan Lingkungan. (Sumber : Suparmoko 1989)

Dengan berkembangnya jumlah penduduk, maka perekonomian harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan manusia atau mempertinggi taraf hidup masyarakat, dan sisi lain hal ini akan lebih banyak menuntut penyediaan sumberdaya alam yang lebih tinggi, dampaknya adalah semakin menipisnya persediaan sumberdaya alam. Di samping itu pencemaran lingkungan seringkali terjadi sebagai eksese dari eksploitasi dan dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini akan dialami masyarakat desa sekitar hutan, jika laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi tentu akan menuntut penyediaan barang dan jasa yang semakin banyak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka sumberdaya alam yang ada disekitarnya akan menjadi sasaran eksploitasi, yang jika tidak bijaksana dalam pengambilan sumberdaya alam tersebut akan mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor atau hilangnya sumber-sumber mata air dalam kawasan hutan yang tentu akan mempengaruhi seluruh aktivitas masyarakat sekitar hutan sampai hilir.

Masyarakat dengan pendidikan rendah dan jumlah tanggungan keluarga yang besar tentu akan sangat mempengaruhi persepsi dan pola tindakan terhadap suatu obyek termasuk terhadap kawasan hutan. Kombinasi antara kedua unsur ini pada diri seseorang akan berpotensi memberikan tekanan terhadap kawasan. Sebab pada umumnya pendidikan berkorelasi positif dengan kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu peluang dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya dan memahami potensi yang ada pada diri dan lingkungannya. Untuk mengembangkan/mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa sekitar hutan maka sektor pendidikan seharusnya mendapat perhatian lebih serius dengan cara

peningkatan pelayanan pendidikan yang menjangkau dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pola Pemanfaatan Lahan Hutan

Desa Pengadangan

Aktivitas pertanian masyarakat di lahan hutan telah memiliki pola waktu yang dipengaruhi oleh musim kegiatan pertanian di luar hutan. Pola kegiatan bertani disajikan dalam kalender musim kegiatan bertani pada tabel berikut.

Tabel 3 Kalender Musim Kegiatan Bertani Masyarakat Responden Desa Pengadangan.

Kegiatan	Bulan											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persiap.Lahan	P	P		P	P/T		J/C	J/C				
Tanam		P	P	P	P/T	T	T	T				
Pemeliharaan		P	P	P	P	P/T	P/T	T/J/C	T/J/C	T/J/C	T/J/C	
Panen					P	P	P	P	T/J//C	T/J/C	T/J/C	T/J/C
Buruh /Jasa	P	P	P	P	P/T	P/T	T	T	T/TO	T/TO/C	T/TO/C	T/TO/C

Keterangan :

P : Padi; T : Tembakau; J: Jagung; C: Cabe; BP: Buruh Tani;
 TO : Tukang Ojek; G: Buruh Galian C

Pola tanam pertanian di Pengadangan adalah padi-padi palawija dan padi-tembakau. Awal kegiatan musim bertani yaitu sekitar bulan Oktober ditandai dengan datangnya musim hujan dan masyarakat petani mulai mempersiapkan lahan untuk menanam padi. Kegiatan bercocok tanam padi pertama dilakukan sampai bulan Februari. Setelah panen padi pertama, maka petani terbagi dua kelompok berdasarkan pola penggunaan lahan yaitu pola padi-padi-palawija dan pola padi-tembakau. Umumnya petani mengikuti pola padi-tembakau. Hal ini disebabkan areal sawah sebagian besar beririgasi setengah teknis, sehingga tidak memungkinkan untuk menanam padi dua kali. Di samping itu menurut petani bahwa usaha tembakau lebih menguntungkan dibanding dengan padi dan jagung. Sedangkan petani yang mengikuti pola padi-padi-palawija disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu *pertama* : sawah yang mereka garap beririgasi teknis yang tersedia air sepanjang tahun dan *kedua* : petani tidak memiliki modal dan teknologi untuk menanam tembakau, sehingga nampak unik dimana banyak petani yang menyewakan lahan garapannya untuk budidaya tembakau, selanjutnya mereka

menjadi buruh tani tembakau dengan upah bervariasi antara Rp.8.000–Rp.15.000 per hari, tergantung jenis pekerjaannya. Kegiatan usaha budidaya tembakau berlangsung sampai bulan Agustus. Selesai periode tembakau, sawah dibiarkan kosong menunggu datangnya musim hujan.



Gambar 4 Aktivitas Pertanian Masyarakat di Luar Kawasan Hutan.

Antusias masyarakat Pengadangan menanam tembakau sangat tinggi (Gambar 4), hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya areal tanaman tembakau dari tahun ke tahun dan pada tahun 2005 ini areal tanaman tembakau mencapai 350 ha. Tingginya minat masyarakat untuk menanam tembakau selain ditunjang dengan kondisi lahan yang cocok, juga karena petani bermitra dengan industri yang akan menjamin pemasaran hasil dengan prinsip kerjasama saling menguntungkan. Pada tahun 2005 target produksi tembakau untuk NTB 50.000 ton daun tembakau kering, dan realisasi produksi tahun 2004 hanya mencapai 35.000 ton (BPS, Lombok Timur 2004). Kegiatan produksi tembakau selama ini, membangkitkan roda perekonomian masyarakat Lombok Timur pada khususnya dan NTB secara umum. Sebab yang terpenting dalam masyarakat adalah adanya aktivitas sehari-hari yang dapat mendatangkan uang walaupun hanya sebatas untuk menutupi kebutuhan pokok. Dengan tingginya aktivitas di sawah baik sebagai petani maupun sebagai buruh tani menyebabkan masyarakat tidak ada waktu lagi untuk beraktivitas di dalam hutan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa aktivitas di sawah tidak berlangsung sepanjang waktu, maka pada saat pekerjaan di sawah mulai berkurang antara bulan 5-10, masyarakat umumnya mengisi waktunya dengan menjadi buruh *galian C* atau buruh tani di kebun-kebun kopi, alpukat dan cengkeh yang merupakan lahan hutan

dikonversi menjadi kebun masyarakat. Jenis pekerjaan yang dilakukan adalah buruh pemetik kopi dan cengkeh dengan upah antara Rp.5000-Rp.8000/hari. Ketiga komoditi yaitu alpukat (*Persea americana*), kopi (*Cofea robusca*) dan cengkeh (*Eugenia aromatica*) umumnya ditanam dalam satu areal dalam bentuk kebun campuran (Tabel 4). Pola kebun campuran menjamin adanya aktivitas yang terus menerus dalam kebun walaupun dengan intensitas yang rendah. Di samping itu pola ini memberikan jaminan pendapatan, jika satu komoditi gagal panen maka masih ada harapan dari komoditi yang lain.

Tabel 4 Pemanfaatan Lahan Hutan oleh Responden Masyarakat Desa Pengadangan

No Responden	Luas (ha)	Komoditi/Produksi (Kg)		
		Alpukat	Kopi	Cengkeh
4*	0.6	500	-	-
5*	0.6	350	100	-
6	0.3	275	50	-
7	0.5	255	50	100
8	0.3	412	-	-
10*	0.2	267	-	-
11	0.35	350	-	-
12	0.4	-	330	-
13	0.6	-	200	250
14	0.4	350	100	-
15	0.4	-	170	170
16	0.5	-	150	225
17	0.6	350	100	200
Jumlah	5.75	3109	1250	945
Rata-rata	0.43	345.44	138.9	189

Keterangan : * : Penjaga kebun/Tukang kebun

Berdasarkan Lampiran 5, diketahui sebanyak 72.2% (13 KK) masyarakat responden memanfaatkan lahan hutan sebagai kebun (Tabel 3), 3 KK diantaranya yang menggantungkan hidupnya hanya pada kawasan hutan karena tidak memiliki lahan garapan di luar hutan. Rata-rata luas garapan 0.43 ha dengan luas areal yang dimanfaatkan 5,75 ha. Pola penggunaan lahan hutan oleh masyarakat adalah memelihara tanaman tahunan/tanaman perkebunan yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu seperti alpukat, kopi dan cengkeh dengan konsekuensi masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon yang ada di dalam kebun. Dengan kondisi seperti ini masyarakat pada hakekatnya sudah tidak memiliki lahan tersebut, kepemilikannya telah diambil alih oleh pemerintah sejak tahun 2001, dengan

dikeluarkan seluruh aktivitas masyarakat berupa pertanian dari dalam hutan, masyarakat dilarang mengolah tanah dan menanam tanaman semusim karena dianggap merusak kawasan hutan dan dapat membahayakan lingkungan sekitarnya.

Untuk dapat mengalihkan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dari mengancam lingkungan menjadi ramah lingkungan (prinsip konservasi) tentu bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama. Semua pihak harus terlibat secara sinergis sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yaitu kelestarian kawasan konservasi dan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat lokal (Haeruman 1996).

Pemilik kebun tidak merawat tanaman secara intensif, seperti pemupukan, pemangkasan dan pengendalian hama penyakit, sehingga tanaman terkesan dibiarkan tumbuh dengan sendirinya (Gambar 5). Pemilik kebun datang hanya untuk melihat keadaan tanaman, khususnya yang berhubungan dengan datangnya musim berbuah. Untuk kegiatan ini cukup dilakukan oleh 1 orang anggota keluarga dan tidak memerlukan waktu yang lama, biasanya ke kebun dua hari sekali, di luar waktu tersebut mereka menjadi buruh tani dan buruh *galian C*. Kegiatan masyarakat di kebun akan intensif lagi menjelang musim panen. Terkadang kebun diserahkan ke masyarakat yang tidak memiliki kebun untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil dengan prosentase yang bervariasi antara 25% - 50% untuk tukang kebun/penjaga kebun. Tukang kebun yang tidak memiliki lahan garapan diluar hutan dan tidak memiliki keahlian lain, maka tukang kebun menjadi pekerjaan utama, seperti yang dialami oleh 3 KK responden (Tabel 4). Kegiatan tukang kebun lebih pada pemeliharaan ringan seperti pemangkasan, babat rumput dan menjaga keamanan pada saat musim berbuah.





Gambar 5 Kebun Masyarakat dalam Kawasan Hutan.

Sebagai dampak dari dikeluarkannya aktivitas bertani dari dalam hutan, maka masyarakat mengalihkan kegiatannya pada usaha *galian C*. Lahan yang difungsikan sebagai lokasi *galian C* adalah lahan-lahan yang tidak produktif sebagai lahan pertanian karena tidak mendapat air dan tanahnya lebih banyak mengandung pasir dan batuan. Pemerintah Daerah Lombok Timur menyadari bahwa kegiatan *galian C* ini berpotensi merusak lingkungan, tetapi tetap dibiarkan sebagai solusi jangka pendek sambil terus mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan ini.

Desa Loloan

Berdasarkan kalender musim kegiatan bertani masyarakat, dapat diketahui bahwa masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan pertanian sepanjang waktu dalam bentuk pertanian intensif (Tabel 5). Berdasarkan data yang diperoleh (Tabel 6), terlihat bahwa semua responden memiliki pola pemanfaatan lahan yang sama yaitu menanam tanaman pangan yaitu padi ladang, jagung, dan tanaman perkebunan seperti kakao, kopi dan pisang. Melihat cara pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat dapat dikatakan bahwa secara umum hidupnya tergantung pada hasil dari pemanfaatan lahan hutan. Dalam mengelola lahan hutan masyarakat pada hakekatnya punya aturan dan norma-norma yang dipatuhi oleh setiap masyarakat (norma sosial). Bentuk aturan tersebut adalah larangan mengeksploitasi hutan untuk kepentingan pribadi. Pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan pertanian dilakukan melalui tahanan “*menjango*” (survey lahan) untuk melihat kelayakan lahan untuk pertanian dan tidak menimbulkan kerusakan tanah dan air. Norma lain yang berlaku

adalah “*membangar*” (pemetaan lahan) yang akan di jadikan areal pertanian (Zakaria 2000; Mujidtahid 2002). Jika diamati bahwa makna konservasi sangat kental dalam setiap aturan dan norma yang dianut masyarakat

Tabel 5 Pemanfaatan Lahan Hutan oleh Responden Masyarakat Desa Loloan

No Responden	Luas (ha)	Komoditi/Produksi (Kg)			
		Pisang	Kopi/Kakao	Padi	Jagung
1	0.7	55	50/150	700	800
2	1.0	85	0/300	750	950
3	0.5	55	50/150	500	650
4	0.5	55	60/200	600	800
5	0.5	44	0/200	600	500
6	0.4	40	50/150	500	500
7	0.5	40	65/250	600	500
8	0.8	65	0/250	840	750
9	0.7	60	0/150	800	680
10	0.7	60	50/150	850	800
11	0.5	50	0/200	700	750
12	0.5	60	50/150	700	680
13	1.0	75	0/350	1300	800
14	0.5	55	0/250	500	650
15	0.5	55	50/150	500	650
16	1.0	80	75/350	850	900
17	0.6	60	0/250	750	850
Jumlah	10.9	994	500/3500	12040	12210
Rata-rata	0,64	58,47	55,55/205,88	1104	1120

Masyarakat Loloan menggunakan lahan hutan sebagai lahan pertanian karena lahan di luar kawasan hutan sangat tidak mendukung untuk kegiatan pertanian, di samping masyarakat mengklaim tanah itu milik mereka, telah dikelola secara turun temurun. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Slotkin (1950) diacu dalam Purnomohadi (1985), bahwa dalam sekelompok masyarakat terjadi jalinan yang padu antara tiga faktor yaitu manusia, ruang dan waktu. Secara kodrati ruang tempat individu hidup tidaklah sekedar merupakan tempat hidup alami, tetapi juga merupakan lingkungan sosial-budayanya. Kaidah biologis yang menuntut adanya kemampuan suatu organisme melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, dengan cara mengubah diri agar sesuai dengan lingkungannya atau sebaliknya, lingkungan diubah agar sesuai dengan dirinya. Konsep ekologi manusia yang menelaah hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya yang salah satu bentuknya dalam pemanfaatan

sumberdaya hutan. Sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan seiring dengan meningkatnya penduduk, maka hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya menjadi tidak padu lagi, bahkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia lebih cenderung mengeksploitasi lingkungannya sebagai bentuk pengadaptasian.

Sehingga untuk mengeluarkan aktivitas masyarakat dari kawasan hutan seperti di Desa Pengadangan dan Sembalun Lawang masih sangat sulit. Kesulitan ini diakui oleh Pemerintah Lombok Barat, dan masalah tanah menjadi hal yang sangat krusial untuk dibicarakan secara terbuka. Setiawan (2001), mengemukakan bahwa paling tidak terdapat empat alasan mengapa persoalan tanah menjadi fundamental dalam pengelolaan lingkungan ; 1) Tanah merupakan media lingkungan utama yang tidak bergerak sehingga nilai keberadaannya tak tergantikan, 2) sebagian besar masyarakat masih mengandalkan tanah sebagai aset utama produksi baik untuk sektor kehutanan, pertanian dan perikanan, 3) sebagian besar masyarakat kita yang tinggal dipinggir hutan belum memiliki skill yang cukup untuk bekerja di sektor lain selain pertanian yang relatif tidak tergantung pada tanah sebagai faktor utama produksi, 4) perbandingan antara luas tanah dengan jumlah penduduk semakin mengecil yang mengakibatkan semakin tingginya sensitifitas masalah tanah.

Persoalan lain yang mulai mengemuka akhir-akhir ini adalah adanya perasaan ketidakadilan dalam masyarakat tentang ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh sekelompok kecil masyarakat yang memiliki modal/kapital dan kekuasaan. Hal ini tidak hanya menyebabkan akumulasi pemilikan dan pemanfaatan tanah tidak sehat, tapi juga menyebabkan proses marginalisasi masyarakat lokal baik secara sosial, ekonomi, kultural dan politis yang di beberapa tempat telah menimbulkan konflik terbuka. Kristian (2004), mengemukakan bahawa latar belakang perambahan hutan di NTB adalah : kekurangan lahan pertanian dan sarana pertanian, tingkat pengangguran yang tinggi, kebiasaan masyarakat yang telah ada sejak lama, dan adanya provokasi dari tokoh-tokoh masyarakat.

Markum (2001) mengemukakan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan hutan di NTB yang bermuara pada berbagai masalah ekonomi, sosial, politik dan lingkungan bersumber dari rasa ketidakadilan dan tersumbatnya



proses dialogis antar berbagai pelaku. Jika dikaitkan dengan pendapat Fisher *et al.* (2000) dan kondisi masyarakat sekitar TNGR, bahwa pemicu konflik diantaranya *interest conflict* dan *structural conflict*. Dan jika dikategorikan lebih spesifik ada tiga hal menonjol sumber konflik yaitu pada level : 1) pengambil keputusan dan kebijakan, 2) stakeholders, dan 3) masyarakat. Berbagai level ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam kapasitasnya memunculkan konflik baik terbuka maupun sistematis. Kasus hutan di Provinsi NTB khususnya kawasan Gunung Rinjani, yang paling menonjol adalah perambahan hutan untuk kegiatan pertanian (Markum 2001).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat setiap tahun memberikan program penanganan terhadap dampak perambahan ini berupa pelatihan kader konservasi, pembentukan kelompok pencinta lingkungan, pelatihan keterampilan serta program reboisasi berupa pemberian bibit kakao (*Theobroma cacao*) dan jambu mete (*Anacardium occidentale*) kepada masyarakat agar lahan gersang dan tandus di luar hutan dapat berfungsi sebagai lahan produktif.

Tabel 6 Kalender Musim Kegiatan Bertani Masyarakat Responden Desa Loloan

Kegiatan	Bulan											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Pembers.Lahan	BB	BB										
Tanam			PL/J	PL/J	PL/J	PL/J						
Pemeliharaan			PL/J	PL/J	PL/J	PL/J	PL/J	J	P/K	P/K	P/K	P/ K
Panen	JM	JM			PL/J	PL/J	PL/J	PL/J	J	J		
Buruh / Jasa											O/B	O/B

Keterangan :

BB : Babat/bakar; PL : Padi Ladang; J : Jagung; JM : Jambu Mete;
 O : Tukang Ojek; B : Buruh Bangunan

Kegiatan bertani masyarakat responden di Desa Loloan dimulai pada bulan September (Tabel 5), berupa membat rumput/semak-semak/pohon perdu. Rumput dan semak-semak setelah dibabat dibiarkan sampai kering untuk selanjutnya dibakar (Gambar 6). Sedangkan pohon-pohon kecil/tiang dan pancang diambil untuk dijadikan kayu bakar. Kegiatan membersihkan lahan dilakukan sebelum datangnya musim hujan dengan maksud semak-semak/ rumput dapat cepat kering dan dibakar. Di samping itu pada musim kemarau aktivitas masyarakat relatif kurang. Masyarakat mengisi waktu dengan dengan memelihara tanaman

dikebun seperti pisang, kakao. Akan tetapi pemeliharaan yang dilakukan sangat ringan, sehingga cukup dilakukan satu orang dalam satu keluarga, biasanya dilakukan oleh ibu rumah tangga.

Bulan Nopember sebagai awal musim hujan, lahan yang telah dibersihkan dan dibakar, siap ditanami benih padi ladang (Gambar 7). Menanam padi ladang bagi masyarakat Loloan mutlak dilakukan karena produksi padi akan disimpan selama setahun untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menanam padi dilakukan tanpa menggunakan teknologi seperti penggunaan benih unggul, pupuk dan penan dilakukan secara sangat sederhana (Gambar 8b). De Vries (1972) dalam Purnomohadi (1985), bahwa pola perladangan hanya memerlukan masukan tenaga kerja dan modal yang sangat sedikit. Tenaga kerja yang digunakan juga hanya terbatas pada anggota keluarga, di samping itu tidak mengenal adanya teknologi pemupukan kecuali pupuk alami, luas garapan relatif kecil dan hasilnya hanya untuk kebutuhan sendiri (*subsisten*). Dampak dari kondisi ini produktivitas lahan sangat rendah hanya berkisar antara 0,7 – 1,2 ton/ha dan hanya dapat dilakukan sekali setahun karena jumlah bulan basahnya 4 bulan. Akibatnya masyarakat kekurangan pangan jika hanya mengharapkan produksi padi ladang.



Gambar 6 Membersihkan lahan, sekaligus mengambil kayu bakar.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan keluarga, musim berikutnya masyarakat menanam jagung pada areal bekas padi ladang. Musim tanam jagung biasanya dimulai pada bulan Januari-Februari. Jagung merupakan makanan pokok kedua setelah beras, jadi menanam jagung juga merupakan pola kegiatan bertani pada masyarakat Loloan. Hasil panen jagung sebagian dijual jika dianggap hasil padi telah mencukupi untuk kebutuhan pangan keluarga, atau sisa dari perkiraan kebutuhan pangan keluarga. Jagung juga dijadikan alat sebagai alat pembayaran

utang atau perdagangan *sistem barter*. Pada masa ini antara bulan Nopember- April hampir semua masyarakat bekerja di kebun (Gambar 8a) mulai dari menanam padi ladang sampai panen jagung.



Gambar 7 Lahan Siap ditanami Padi Ladang.

Bulan Juni setelah panen jagung, mereka sudah jarang lagi ke kebun, walaupun ke kebun hanya untuk mengontrol tanaman pisang dan kakao, dan pemeliharaan ringan. Sebagian lagi masyarakat menjadi tukang ojek. Musim kemarau berlangsung antara bulan Juni – Oktober, pada masa itu masyarakat mulai mengumpulkan kayu bakar untuk dipakai selama setahun. Jadi pada saat musim hujan sudah tidak bisa lagi mengambil kayu bakar karena karena kayu basah juga karena sibuk bertani dilahan. Masyarakat mengambil kayu bakar tidak untuk dijual tetapi hanya untuk dipakai sendiri. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang menjual kayu bakar, karena kendala transportasi.



Gambar 8 Pemeliharaan (a) dan Panen (b) Padi Ladang.

Pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat di Pengadangan dengan menanam tanaman perkebunan dan buah-buahan, merupakan suatu bentuk interaksi yang memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. Lahan hutan yang dapat



dijadikan areal perkebunan adalah lahan-lahan rusak sebagai dampak dari penebangan liar. Konsensus yang dapat dibuat dalam kasus ini adalah bahwa pemerintah memberikan lahan untuk masyarakat dan menyediakan bibit tanaman perkebunan seperti kakao, alpukat, kopi. Sedangkan masyarakat berfungsi sebagai pelaksana dengan komitmen tidak ada perambahan hutan lagi ditempat lain, selain itu masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penjaga hutan dari gangguan lainnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat mengolah lahan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Hal yang sama dapat diterapkan pada masyarakat Loloan, masyarakat dengan pemerintah membangun sebuah kesepakatan yang merupakan solusi menyeluruh terhadap kondisi dialami masyarakat. Pemerintah dapat memberikan bibit tanaman yang bernilai ekonomi tinggi untuk jangka waktu yang lama, dan dikenal masyarakat setempat. Di samping itu pemerintah memberikan bantuan lainnya seperti sarana pendidikan yang layak, untuk menjawab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Tujuan akhir dari kesempatan ini adalah masyarakat mengubah pola pertaniannya dari pertanian intensif dengan tanaman semusim menjadi perkebunan yang tidak memerlukan pengolahan lahan tetapi jaminan pendapatan masyarakat lebih tinggi.

Desa Sembalun Lawang

Berdasarkan hasil pengamatan (Tabel 7), diketahui bahwa 68% (13 KK) responden menggunakan lahan hutan seluas areal 5.4 ha dengan rata-rata 0.4 ha. Sebanyak 15.79% responden tidak memiliki lahan garapan diluar hutan, sehingga aktivitasnya bergantung pada kawasan hutan dan 5.3% responden tidak memiliki lahan garapan (Lampiran 7). Pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat tidak untuk kegiatan pertanian. Pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat Sembalun Lawang lebih pada mengambil sumberdaya hasil hutan berupa bambu, seperti halnya dengan kebun masyarakat di Desa Pengadangan, hanya mengambil hasil kebun yang ditanam beberapa tahun yang lalu sebelum aktivitas pertanian di dalam hutan dilarang.

Tabel 7 Pemanfaatan Lahan Hutan oleh Responden Masyarakat Desa Sembalun Lawang.

No Responden	Luas (ha)	Komoditi		
		Bambu	Rumput	Alang-Alang
1	0.2	v		
4	0.7	v	v	
5	0.3	v	v	
6	0.6	v	v	v
7	0.5	v		v
9	0.7	v	v	
11	0.3	v	v	v
12	0.3	v		
13	0.3	v	v	
15	0.4	v	v	
17	0.3	v	v	
18	0.4	v	v	
19	0.4	v	v	
Jumlah	5.4	13	10	3
Rata-rata	0,4			

Kegiatan bertani masyarakat Desa Sembalun Lawang dilakukan sepanjang tahun (Tabel 8), hal ini dimungkinkan karena daerah Sembalun Lawang memiliki curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun. Sehingga kalender musim kegiatan bertani masyarakat tidak membentuk pola yang jelas seperti di desa lain. Usaha pertanian yang dilakukan masyarakat adalah pertanian hortikultura, khususnya sayur-sayuran dataran tinggi, seperti bawang, wortel, kol, paprika, dan buah-buahan seperti apel, alpukat, nanas.

Tabel 8 Kalender Musim Kegiatan Bertani Masyarakat Responden Desa Sembalun Lawang.

Kegiatan	Bulan											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
P.Tanah	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/B	S/B
Tanam	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B	S/P	S/P	S/P	S/B	S/B	S/B	S/B
P.liharaan	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B	S/P	S/P	S/P	S/P	S/B	S/B	S/B
Panen	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B	S/P	S/P	S/P	S/B	S/B
Buruh /Jasa	OPR	OPR	OPR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR

Keterangan :
S: Sayur-sayuran; B : Buah-buahan; O : Tukang Ojek; P : Padi; R : Rumput

Kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih menanam tanaman hortikultura dibandingkan dengan tanaman pangan seperti padi sebabkan oleh kondisi alam, dimana tanaman padi pada dataran tinggi tidak dapat berproduksi

maksimal dan umurnya menjadi lebih panjang, serta produktivitasnya rendah hanya 3 ton/ha. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari usaha tanaman hortikultura jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman pangan. Padi biasanya ditanam pada daerah-daerah terbuka dan datar yang sulit membuang air serta padi ladang. Produksi padi hanya untuk keperluan masyarakat Sembalun Lawang sendiri, tidak untuk dijual keluar daerah, karena produksi masih jauh dibawah kebutuhan masyarakat sembalun.

Pola Pemanfaatan Hasil Hutan

Desa Pengadangan

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengambil sumberdaya yang ada disekitar mereka sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan. Masyarakat desa sekitar hutan yang sebagian besar tergolong masyarakat miskin, akan mengambil sumberdaya berupa hasil hutan disamping memanfaatkan lahan hutan. Dalam mengambil hasil hutan masyarakat memiliki cara tersendiri yang telah berlangsung sejak lama. Memanfaatkan hasil hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, selain untuk menambah penghasilan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui kalender musim pengambilan hasil hutan oleh masyarakat Pengadangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Kalender Musim Pengambilan Hasil Hutan Masyarakat Responden Desa Pengadangan.

Jenis Sumberdaya yang Diambil	Bulan												
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
Kayu Bakar													
Buah-buahan													
Jamur/Pakis													

Tabel kalender pemanfaatan hasil hutan jika dipadukan dengan kalender musim kegiatan bertani, dapat diketahui kecenderungan masyarakat mengambil atau memanfaatkan sumberdaya hasil hutan pada saat aktivitas di sawah (baik sebagai buruh tani maupun sebagai petani) sudah mulai berkurang, dan dipengaruhi oleh musim ketersediaan sumberdaya hasil hutan serta kebutuhan.

Hasil pengamatan (Lampiran 8) menunjukkan bahwa 33,0% responden mengambil hasil hutan berupa jamur/pakis, dan 16,0% mengambil buah-buahan dan



kayu bakar 78,0%. Buah nangka (*Artocarpus integra*) umumnya diambil dalam bentuk nangka muda yang dijadikan sayur. Tujuan mengambil hasil hutan adalah untuk mengisi waktu luang, memenuhi kebutuhan pokok dan mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Kelompok masyarakat ini sebenarnya tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi dalam administrasi desa mereka termasuk kelompok buruh tani.

Volume pengambilan buah nangka muda tergolong tinggi, karena tingginya permintaan pasar. Sedangkan jamur dan pakis volumenya relatif rendah, karena keterbatasan sumberdaya hasil hutan dan untuk mendapatkan masyarakat harus mencari sampai jauh masuk ke dalam hutan dan tentu ini menyita waktu, disisi lain masyarakat sedang banyak aktivitas diluar hutan sebagai petani maupun buruh tani. Pekerjaan mengambil buah nangka, jamur dan pakis dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki sawah/lahan pertanian, sementara untuk menjadi buruh tani harus keluar kampung mencari petani yang mau memakai jasa mereka. Kalaupun mereka menjadi buruh tani hanya sewaktu-waktu, seperti pada saat musim tanam padi, musim panen padi dan saat pembuatan guludan tembakau, sehingga untuk menutuoi kebutuhan mereka mencari penghasilan di dalam hutan.

Beckman (2004), bahwa masyarakat mengambil kayu bakar karena terpaksa oleh keadaan dimana tidak ada pekerjaan lain. Pada musim kemarau mulai bulan Mei - September, pada saat aktivitas bertani mulai berkurang, intensitas masyarakat mengambil hasil hutan dalam bentuk kayu bakar sangat tinggi. Masyarakat mengambil kayu bakar secara berkelompok, satu kelompok dapat berjumlah sampai 5 orang atau lebih, yang umumnya masih ada hubungan keluarga. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pekerjaan seperti menebang, membelah dan mengangkut kayu hasil olahan ke tempat yang dapat dijangkau kendaraan roda empat (truk). Kelompok masyarakat yang mengambil kayu bakar jauh lebih banyak dari masyarakat yang mengambil sumberdaya yang lain. Kegiatan ini berlangsung terus menerus dari tahun ke tahun, dan di lakukan oleh masyarakat yang sama.

Bentuk operasi kelompok pencari kayu bakar adalah kelompok masyarakat pencari kayu bakar memasuki hutan saat masih gelap (*subuh*), dan biasanya keluar hutan sore hari. Pola ini yang membuat petugas tidak dapat menjangkau kelompok ini. Peralatan yang dipakai adalah golok dan kapak serta gergaji panjang. Kayu yang ambil umumnya kayu yang lurus dan relatif kecil (diameter < 15 cm) dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

alasan lebih mudah ditebang dan dibelah, sehingga prosesnya lebih cepat. Kayu yang telah dibelah dibiarkan beberapa hari sampai kering baru kemudian diangkut ketempat yang dapat dijangkau kendaraan dan relatif aman dari petugas. Lokasi tempat mengambil kayu bakar agak ke tengah hutan sehingga tidak terlihat dan terdengar pada saat menebang dan membelah walaupun lebih sulit membawanya keluar.

Dari pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa terdapat kerusakan lain dari pengambilan kayu bakar adalah masyarakat tanpa sadar menebang kayu/pohon kecil yang dilewati pada saat mengangkut hasil untuk membuat jalan setapak. Hasil wawancara dengan aparat desa dan petugas/ polisi hutan diakui bahwa tekanan yang paling besar dialami kawasan hutan adalah pengambilan kayu bakar, dan diprediksi ke depan akan semakin tinggi volume pengambilan kayu bakar karena kenaikan harga minyak tanah dan “gas elpiji”, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang akan beralih menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi rumah tangga.

Sebanyak 16,7% (3 KK) responden mencari kayu bakar merupakan pekerjaan utama, karena tidak punya lahan pertanian sementara untuk bekerja di sektor lain tidak punya keterampilan. Sikap ekonomis dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang bersifat eksploitatif sudah disadari lebih banyak membawa bencana daripada manfaatnya, terlebih kalau didasarkan atas pandangan jangka panjang. Perambahan hutan untuk kayu bakar dan kayu bangunan telah membuat kerusakan sumberdaya tanah dan air karena proses erosi, semakin berkurangnya populasi satwa dan semakin menurunnya mutu habitat. Akibat dari kerusakan habitat diduga terjadi pula kepunahan beberapa spesies tumbuhan, baik sudah dikenal maupun yang belum sempat dikenal sudah punah (Alikodra 1987; Prawono 1997).

Desa Loloan

Berdasarkan data hasil pengamatan pada Lampiran 6, dapat diketahui bahwa semua responden (100%) mengambil hasil hutan berupa kayu bakar, dan 23% responden mengambil sumberdaya buah kemiri (*Aleurites mollucana*). Waktu pengambilan sumberdaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 Kalender Musim Pengambilan Hasil Hutan Masyarakat Responden Desa Loloan.

Jenis Sumberdaya Yang Diambil	Bulan												
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
Kayu Bakar													
Kemiri													

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat mengambil hasil hutan pada saat kegiatan pertanian baik diluar maupun di dalam hutan relatif kurang . Kayu bakar diambil untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga sebagai sumber energi rumah tangga, masyarakat Loloan belum terbiasa menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Di samping karena masyarakat tidak mampu membeli minyak tanah juga didukung adanya kayu bakar yang tidak harus dibeli. Mengambil kayu bakar dilakukan bersamaan dengan kegiatan membabat/membersihkan lahan (Gambar 7).

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, menyebabkan mobilitas masyarakat sangat rendah. Aktivitas harian responden hanya sebatas di lingkungan sekitarnya. Sebanyak 88% responden tidak pernah keluar desa selama setahun. Setiap hari khususnya pada saat budidaya padi ladang masyarakat ke ladang. Kegiatan ini dilakukan dari pagi sampai sore.

Selain kayu bakar, hasil hutan lain yang diambil masyarakat adalah kemiri. Kemiri diambil dengan cara memungut dibawah pohonnya. Kegiatan ini bukan kegiatan pokok dari masyarakat hanya sampingan, disaat kemiri musim berbuah dan kegiatan di kebun agak berkurang. Kemiri yang didapat biasanya untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual.

Pengelola TNGR bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang akan membuka akses jalan pendakian melalui Torean, merupakan suatu hal yang sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Torean dan Loloan pada umumnya. Chambers (1983), bahwa pandangan kelompok liberal memandang masyarakat sebagai makhluk yang baik namun dipengaruhi oleh lingkungannya. Alikodra (1987), mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan taman nasional adalah konservasi, penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Dengan demikian kebijakan pengelolaan taman nasional bertumpu pada kepentingan masyarakat. Disisi lain tentu hal ini harus diwaspadai oleh semua pihak, bahwa

pembukaan akses ini tentu akan menimbulkan konsekuensi dimana masyarakat akan terbuka dan arus informasi, barang dan jasa akan semakin mudah masuk ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan misi dan visi pengembangan suatu kawasan konservasi, dimana disebutkan bahwa pengembangan suatu menjadi kawasan konservasi harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar (Wells *et al.* 1992 ; UU Nomor 5 Tahun 1990). Wells *et al.* (1992) memperkenalkan *Integrated Conservation-Development Project (ICDP)* sebagai salah satu contoh pendekatan partisipatif yang menekankan pengelolaan taman nasional yang dipadukan dengan proyek-proyek pembangunan masyarakat sekitarnya. Pendekatan ini banyak diterapkan untuk berbagai kegiatan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengaitkan konservasi keragaman hayati pada suatu kawasan lindung dengan kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep ICDP pemanfaatan sumberdaya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar merupakan ide sentral, akan tetapi kesinambungan dan kelestarian sumberdaya alam baik yang ada di dalam maupun disekitar kawasan taman nasional harus tetap terjaga (Wells *et al.* 1992).

Proyek ICDP dirancang menurut empat komponen inti yakni: 1) *Pengelolaan taman nasional* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola taman nasional dan mendukung kegiatan penegakan peraturan yang berkaitan dengan taman; 2) *Pengelolaan zona penyangga*, yang meliputi pengelolaan area yang berbatasan dengan taman nasional oleh masyarakat; 3) *Pembangunan sosial ekonomi masyarakat lokal* yang dirancang untuk memperbaiki perencanaan tata guna lahan, hak kepemilikan lahan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat yang berada di sekitar taman nasional; dan 4) *Pemantauan dan evaluasi* untuk memberikan data tambahan tentang keragaman hayati dan untuk melakukan penilaian dampak proyek terhadap masyarakat dan sumberdaya di sekitar taman nasional.

Pendekatan ICDP sangat populer karena gagasan ini menawarkan prospek yang menarik untuk andil dalam mencapai tiga tujuan utama yang ingin dicapai dalam agenda pembangunan berkelanjutan yaitu: *pelestarian keanekaragaman hayati yang lebih efektif, peningkatan peran serta masyarakat setempat dalam pelestarian dan pembangunan, serta pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan yang miskin.* Jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat desa sekitar TNGR,





khususnya masyarakat Loloan yang hidup dibawah garis kemiskinan, maka konsep ini perlu dipertimbangkan dengan kesesuaian kondisi masyarakat, sebab dalam masyarakat miskin memiliki keterbatasan kepemilikan asset, terisolasi, rentan akan perubahan, tidak berdaya (cenderung pasrah menerima nasib), dan kondisi fisik yang lemah (Chambers 1983).

Desa Sembalun Lawang

Desa Sembalun Lawang sebagai salah satu pintu utama memasuki kawasan rinjani, memiliki peran strategis untuk menunjang salah fungsi TNGR yaitu fungsi pariwisata alam. Karena letak dan fungsinya strategis maka segala infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang tujuan pariwisata disediakan oleh pemerintah antara lain jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih, serta penginapan.

Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan di Sembalun Lawang termasuk paling tinggi dan paling beragam jenis interaksinya. Interaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan/pengambilan hasil hutan dapat digolongkan dua bentuk/jenis yaitu bentuk diperbolehkan dan yang dilarang. Berdasarkan data hasil pengamatan pada Lampiran 10, dapat diketahui jenis hasil hutan yang diambil dan waktu pengambilannya.

Tabel 11 Kalender Musim Pengambilan Hasil Hutan Masyarakat Responden Desa Sembalun Lawang.

Jenis Sumberdaya yang Diambil	Bulan											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Kayu Bakar	Red	Red	Red	Red	Red							
Kayu bangunan						Teal	Teal	Teal	Teal			
Madu				Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	
Bambu	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green				Green	Green
Alang-alang		Yellow	Yellow	Yellow								
Rumput	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green

Pengambilan sumberdaya hasil hutan di Sembalun Lawang harus diawasi dengan baik agar interaksi masyarakat dengan kawasan tidak menimbulkan dampak yang dapat merusak kawasan. Jika kondisi Sembalun rusak dapat menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke rinjani tidak melalui Sembalun lagi dan tentu ini merupakan kerugian yang besar bagi masyarakat Sembalun secara umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Berdasarkan hasil pengamatan pada Lampiran 10, sebanyak 78,95% responden mengambil kayu bakar dalam kawasan hutan, 68,4% mengambil rumput, 21% mengambil alang-alang, 26,3% mengambil kayu bangunan dan madu. Pengambilan kayu bakar sangat tinggi intensitas dan volumenya sehingga potensial merusak kawasan hutan. Tingginya intensitas dan volume pengambilan kayu bakar, karena jenis sumberdaya ini tidak tergantung musim, walaupun masyarakat lebih cenderung mengambil pada saat musim kemarau yaitu antara bulan 5 – 9 (Tabel 11), terdapatnya sarana jalan sehingga transportasi menjadi mudah, dan tersedianya jaringan pasar. Volume kayu bakar yang diambil masyarakat mencapai 2437 ikat setiap tahun. Tujuan utama masyarakat mengambil kayu bakar adalah untuk memperoleh pendapatan (komersial) dan sebagian kecil untuk keperluan sendiri.

Hasil penelitian (Lampiran 10) menunjukkan bahwa 26,3% responden (5 KK) mengambil hasil hutan berupa kayu bangunan dengan volume $\pm 15 \text{ m}^3$ / tahun. Jenis-jenis kayu yang banyak diambil masyarakat adalah jati (*Tectona grandis*), johar (*Carrisia, sp*), mahoni (*Swietenia*), sonokeling (*Dalbergia latifolia*). Berdasarkan catatan monografi Desa Sembalun Lawang bulan Juni 2005, disebutkan bahwa sebanyak 150 m^3 kayu diambil masyarakat dari kawasan TNGR setiap tahunnya. Sedangkan untuk tingkat NTB tahun 2003 tercatat kayu hasil *illegal logging* dan kayu tanpa dokumen yaitu tonggak 731 batang, kayu bulat dan kayu olahan mencapai $1378,87 \text{ m}^3$ dengan kerugian negara mencapai Rp. 996.894.036 (BPS NTB 2004). Salah satu faktor penyebab tingginya *illegal logging* adalah terdapatnya sarana jalan beraspal yang melewati pinggir hutan dan bahkan dibeberapa titik seperti antara Sembalun dengan Pesugulan jalan raya membelah kawasan TNGR, yang merupakan zona rimba, tersedianya pasar yang menampung kayu hasil curian dan kurangnya petugas pengamanan hutan (TNGR 2005). Sedangkan menurut Dharmawan dan Daryanto (2002), bahwa persepsi yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini sehubungan dengan sumberdaya hutan yang oven akses adalah : Semua milik bersama (bukan milik siapa pun), dapatkan sumberdaya selagi masih dalam keadaan baik, mengapa harus menghemat sedangkan orang lain menghabiskannya. Di samping itu paham *antroposentrisme* cenderung mengabaikan kerusakan lingkungan dalam memanfaatkan sumberdaya alam karena yang dikedepankan adalah kepentingan manusia semata, tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



memperhitungkan bahwa lingkungan hidup mempunyai nilai tersendiri terlepas dari kebutuhan manusia.

Dengan kondisi seperti ini, maka yang paling penting dibangun dan dikembangkan oleh para *stakeholder* adalah partisipasi aktif dari masyarakat lingkaran kawasan agar ikut menjaga dan mengamankan kawasan konservasi, karena masalah keamanan kawasan tidak dapat diatasi dengan menambah jumlah personil keamanan. Partisipasi dari masyarakat dapat diharapkan jika masyarakat memiliki kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi. Jika salah satu dari prasyarat tersebut kurang menurut Sumardjo dan Saharudin (2004), maka partisipasi sulit diharapkan dari masyarakat. Untuk kasus masyarakat sekitar TNGR, kemauan dan kemampuan yang belum dimiliki masyarakat. Kemauan akan timbul jika masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya, dan berkepentingan dengan keberadaan kawasan tersebut. Kasus di beberapa tempat konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat lokal seringkali terjadi, hal ini menunjukkan adanya ketidaksamaan persepsi antara pengelola dengan masyarakat lokal terhadap keberadaan suatu kawasan konservasi. Konflik ini dilandasi oleh sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Faktor kemampuan juga sering menjadi kendala bagi masyarakat sekitar kawasan TNGR untuk berpartisipasi. Dengan kondisi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat yang masih tergolong miskin dan terbelakang (90% dari 600 ribu jiwa) dengan tingkat pendidikan yang rendah sangat sulit untuk diajak berpartisipasi jika ukuran partisipasi adalah pikiran, tenaga, waktu dan materi semua itu tidak dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan (Markum *et al.* 2004).

Tujuan masyarakat mengambil kayu bangunan adalah untuk diperjualbelikan. Waktu pengambilan tergantung pada situasi dan kondisi pengamanan kawasan, serta ada pesanan dari konsumen atau pedagang kayu (*calo/makelar*). Masyarakat mencari kayu bangunan jika ada pesanan atau sebaliknya, masyarakat menawarkan kayu kepada konsumen atau pedagang kayu, setelah disepakati harganya maka masyarakat mencari waktu yang tepat untuk mengambil kayu tersebut. Pekerjaan mengambil kayu bangunan dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok berjumlah 5 orang, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses mengeluarkan kayu dari dalam hutan ke tempat yang dapat



dijangkau kendaraan. Alat yang digunakan adalah gergaji mesin (*chain saw*), gergaji panjang, dan kapak.

Pekerjaan mencari madu yang dihasilkan oleh lebah (*Aphis indica*) banyak dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan (Lampiran 10) diketahui bahwa 26% (5 KK) responden bekerja mencari madu alam di dalam hutan dengan produksi \pm 40 liter/tahun. Angka ini mendekati 50% dari produksi total madu di Sembalun Lawang yang mencapai 80-90 liter/tahun. Masyarakat secara tradisional mencari madu di dalam hutan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun. Produksi madu masyarakat semuanya untuk tujuan komersial. Potensi pengembangan madu masih sangat terbuka karena madu salah satu produk andalan Desa Sembalun Lawang yang digemari para wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Mengambil madu dalam kawasan TNGR tidak dilarang bahkan masyarakat memperoleh bimbingan dari pengelola TNGR tentang cara membudidayakan lebah madu dan proses produksi madu yang baik.

Usaha budidaya lebah madu di Sembalun Lawang semakin strategis jika dikaitkan dengan program Pemerintah Provinsi NTB yang menjadikan madu sebagai salah satu andalan produk hutan non kayu. Sehingga produksi harus terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Produksi madu NTB tahun 2004 mencapai 3750 liter (BPS NTB 2004). Oleh karena itu Pemerintah Daerah sangat menganjurkan masyarakat untuk lebih giat lagi mengusahakan madu baik secara alami maupun lewat budidaya.

Alang-alang (*Imperata cylindrica*), banyak diambil oleh masyarakat hampir setiap saat tergantung ketersediaannya dalam hutan namun intensitas pengambilan akan tinggi pada bulan 5-7. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 21% (4 KK) responden mengambil alang-alang dalam kawasan hutan. Lokasi pengambilan dapat berupa di lahan yang diklaim sebagai kebun maupun di areal bebas dalam kawasan TNGR. Volume alang-alang yang diambil masyarakat responden \pm 460 ikat/tahun. Alang-alang diambil untuk tujuan komersial. Alang-alang berfungsi sebagai atap "beruga" (tempat menerima tamu bagi masyarakat sasak) dan sebagai atap beberapa hotel baik di Lombok maupun di Bali. Alang-alang termasuk sumberdaya yang tidak dilarang pengambilannya, yang perlu diperhatikan adalah pengaturan panennya agar tidak mengganggu proses suksesi alam dan tidak menyebabkan lahan menjadi gundul. Soemarwoto (1994), mengatakan bahwa dalam beberapa hal,



padang alang-alang mempunyai nilai ekonomis dan ekologis tersendiri, akan tetapi ini menjadi petunjuk bahwa status unsur hara tersedia sudah mencapai tingkat minimal dan hanya alang-alang yang masih mampu tumbuh.

Sumberdaya berupa rumput diambil untuk makanan ternak. Populasi ternak khususnya sapi di Sembalun Lawang mencapai 3261 ekor, dengan jumlah tersebut tentu memerlukan pakan yang sangat banyak. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa 68% (13 KK) responden mengambil rumput. Mengambil rumput dapat dilakukan sepanjang waktu disela-sela waktu luang pada saat tidak bekerja di sawah/kebun dengan volume pengambilan \pm 2860 karung/tahun. Tujuan mengambil rumput adalah untuk dijual, dengan motivasi menambah pendapatan keluarga. Tingginya intensitas pengambilan rumput disebabkan oleh : rumput mudah untuk dijual, mengambil rumput tidak memerlukan keterampilan khusus, tidak perlu modal sehingga dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk anak-anak mereka yang masih usia sekolah, rumput diperlukan setiap hari, dan sumberdaya rumput tersedia sepanjang waktu.

Interaksi yang bersifat positif merupakan modal sosial bagi masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah untuk bersama-sama dalam mengelola taman nasional. Interaksi yang bersifat negatif harus segera dihentikan dengan memberikan solusi yang bijaksana. Dengan mengakomodir kepentingan masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lainnya dapat membuat kesepakatan dengan masyarakat yang bersifat mengikat semua pihak. Dalam kesepakatan ini harus terlihat dengan jelas penyelesaian problem masyarakat hal ini untuk menjamin adanya kepercayaan masyarakat akan manfaat yang dapat dinikmati kelak. Sangat sulit mengajak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi jika masyarakat tidak mendapatkan manfaat langsung dari kawasan konservasi, hal ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang miskin.

Model pemeliharaan ternak adalah dilepas bebas berkeliaran sepanjang waktu. Akibat keterbatasan daya dukung pakan dalam desa, maka ternak tersebut akan mencari pakan di dalam kawasan TNGR (Gambar 9). Kebiasaan masyarakat melepas ternak di dalam kawasan taman nasional telah berlangsung sejak lama, hal ini didasari oleh persepsi masyarakat bahwa padang rumput merupakan sumberdaya yang bersifat *communal* sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Sikap Pemerintah terhadap masalah ini adalah membiarkan sambil memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari pengembalaan liar. *Teori negosiasi prinsip* diterapkan untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan masing-masing dan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak (Fisher *et al.* 2000). Sikap konpromi dari kedua belah pihak akan sangat membantu menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

Jumlah ternak yang sedemikian besar dilepas bebas di dalam TNGR, tentu menimbulkan tekanan terhadap kawasan TNGR. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengembalaan liar adalah terganggunya suksesi alam, pemicu kebakaran, hama dan penyakit tanaman (TNGR 2005). Kondisi seperti ini menjadi masalah besar bagi pengelola taman nasional. Melalui program pembinaan daerah penyangga, pihak taman nasional mulai tahun 2005-2008 membuat model pemeliharaan sapi dengan cara dikandangkan. Program ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan model dikandangkan sapi akan lebih cepat besar karena lebih terjamin makanannya dan kesehatannya dikontrol, sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Harga sapi yang dikandangkan dapat mencapai Rp. 3.500.000/ekor sedangkan sapi hasil peternakan liar untuk umur yang sama hanya mencapai Rp.2.000.000/ekor (TNGR 2005).



Gambar 9 Sekumpulan Sapi Masyarakat yang dilepas/diliarkan di dalam Kawasan TNGR.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa stratifikasi sosial yang membedakan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu seperti kelas atas dan kelas bawah yang salah satu dasarnya adalah kekayaan. Kekayaan dalam masyarakat pedesaan dapat diindikasikan dengan adanya kepemilikan ternak besar seperti sapi, kerbau dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kuda (Kolopaking 2004). Oleh karena itu, masyarakat memiliki ternak tidak semata-mata dijadikan sebagai sumber pendapatan utama, akan tetapi lebih pada simbol sosial bahwa kepemilikan ternak menunjukkan mereka berasal dari kelas menengah dan kelas atas tergantung jumlah ternak yang dimiliki. Jika merujuk pada kenyataan ini, maka tujuan program pengelola kawasan taman nasional yang ingin membandingkan nilai ekonomi ternak dilepas bebas dan ternak dikandangkan akan memerlukan waktu yang lama, untuk dapat diterima masyarakat, karena harus mengubah pola pikir dari masyarakat. Kasus pemanfaatan lahan di Sembalun Lawang dalam bentuk pengembalaan liar oleh masyarakat dapat konsensus antara masyarakat dengan pihak lain. Peterson (1997), bahwa konsensus yang buat hanya untuk skala kecil dan bersifat lokal (*spesifik*) sehingga tujuan dari setiap konsensus dapat tercapai. Pemerintah berperan menyediakan padang pengembalaan dan sumber pakan dengan kualitas yang baik sehingga ternak masyarakat tumbuh dengan baik. Sedangkan masyarakat berkomitmen untuk membatasi jumlah ternaknya sesuai dengan daya dukung lahan (*Carring capacity*).

Distribusi Pemasaran Hasil Pemanfaatan Kawasan Hutan

Sumber daya hasil hutan dalam bentuk fisik (lahan hutan dan hasil hutan) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung/konsumsi langsung (subsisten) dan untuk diperjualbelikan (komersial). Hal ini sangat tergantung pada jenis sumberdaya dan ketersediaan sumber daya tersebut, ketersediaan pasar, tersedianya sarana penunjang seperti jalan. Terkait dengan tujuan tersebut, maka ke tiga desa yang diamati masing-masing memiliki pola tersendiri dalam distribusi dan pemasaran hasil dari pemanfaatan kawasan hutan.

Desa Pengadangan

Responden Desa Pengadangan mengambil kayu bakar dengan tujuan utama untuk dijual (komersial) disamping untuk dipakai sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui alur distribusi dan pemasaran hasil hutan (Gambar 10). Kayu bakar umumnya dijual ke kota kabupaten (Selong). Pola penjualannya adalah melalui pedagang pengumpul yang datang mengambil langsung dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan

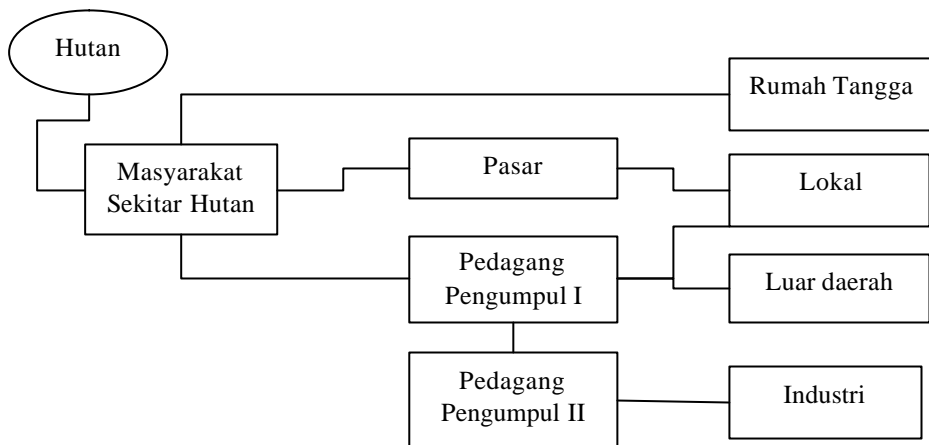
pedagang pengumpul, masyarakat akan menjual kayu bakarnya jika telah terkumpul untuk sekali angkut (satu truk). Untuk mencapai target tersebut, masyarakat membentuk kelompok namun pembagian hasil penjualan tetap sesuai dengan porsi kepemilikan.

Perdagangan kayu bakar sangat mengkuatirkan, karena volumenya sangat tinggi dan telah menyebabkan hutan/kawasan konservasi rusak (6000 ha dari 7597 ha luas hutan yang masuk wilayah Desa Pengadangan) sebagai akibat penebangan liar yang salah satu tujuannya untuk kayu bakar. Untuk itu perlu memotong rantai distribusi pemasaran kayu bakar (Gambar 10), adalah mencegah masuknya pedagang pengumpul dan mengamankan jalur transportasi (jalan raya) dari pengangkutan kayu bakar. Kayu bakar dari masyarakat untuk sampai ke konsumen harus melewati pedagang pengumpul, karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mendistribusikan kayu bakar sampai ke konsumen.

Sedangkan untuk jenis sumberdaya yang lain seperti jamur/pakis yang pengambilannya tidak dilarang harus dibantu pengembangannya, karena sumber daya ini disukai masyarakat, jika ketersediaannya dalam hutan melimpah akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan. Khususnya masyarakat yang tidak punya lahan di luar hutan atau kebun di dalam hutan, sehingga kebutuhannya bergantung dari hasil hutan. Hasil kebun seperti apukat, cengkeh dan kopi yang masih diijinkan pengambilannya, distribusi pemasarannya dapat langsung ke pasar untuk buah apukat, sedangkan kopi dan cengkeh harus melalui pedagang pengumpul yang datang dari luar daerah seperti Mataram, Bali dan Jawa.

Distribusi dan pemasaran hasil hutan di Desa Pengadangan adalah sebagai berikut:





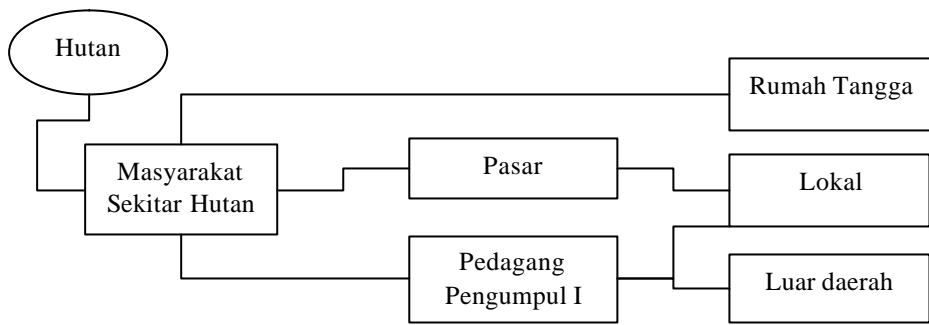
Gambar 10 Alur Distribusi Pemasaran Hasil Hutan oleh Responden Masyarakat Pengadangan.

Desa Loloan

Masyarakat Loloan memanfaatkan sumberdaya hasil hutan berupa kayu bakar dan kemiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat mengambil kayu bakar untuk keperluan sendiri bukan tujuan komersial. Sumber daya kayu bakar merupakan kebutuhan pokok masyarakat (*absolute*), yang belum dapat digantikan oleh sumber daya yang lain dan dipastikan ke depan kebutuhan akan kayu bakar semakin tinggi. Bentuk pemasaran kemiri adalah dapat melalui pedagang pengumpul yang ada di desa ataupun masyarakat langsung menjual ke pasar Loloan ataupun pasar Bayan.

Produksi padi ladang dan jangung masyarakat hanya untuk keperluan sendiri, sehingga pola distribusinya hanya di dalam rumah tangga. Hasil panen masyarakat hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan untuk bulan-bulan tertentu (Oktober-Desember) masyarakat harus membeli beras dari luar daerah. Hasil hutan yang menjadi harapan jangka panjang masyarakat adalah hasil kebun berupa kopi dan kakao. Pola pemasarannya adalah melalui pedagang pengumpul yang ada di desa ataupun pedagang yang datang dari luar daerah seperti Mataram, Bali dan Jawa.

Secara umum jalur distribusi dan pemasaran hasil hutan di Desa Loloan adalah sebagai berikut :



Gambar 11 Alur Distribusi Pemasaran Hasil Hutan oleh Responden Masyarakat Loloan

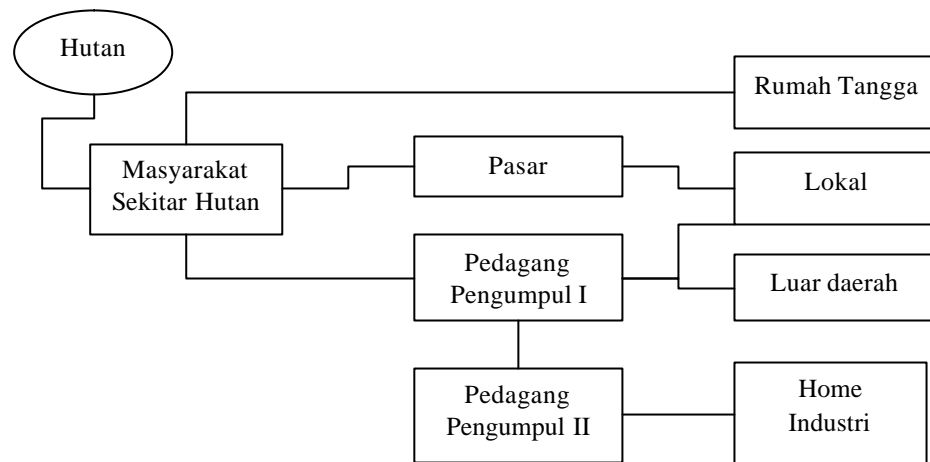
Desa Sembalun Lawang

Masyarakat Sembalun Lawang mengambil jenis sumber daya hutan baik kayu maupun non-kayu paling banyak diantara ketiga desa penelitian. Sumber daya yang diambil untuk dijual (komersial) dan sedikit untuk kebutuhan sendiri. Pola distribusi dan pemasaran sumber daya hutan (Gambar 12),

Rumput sebagai pakan ternak langsung di pasarkan kepada tetangga/konsumen ada di lingkungan sekitar yang memiliki ternak khususnya sapi. Bambu banyak diperlukan dalam kegiatan produksi tembakau sebagai bahan pembuatan oven, dan dalam kegiatan produksi bawang (*Allium cepa*) sebagai tempat menjemur bawang. Untuk itu tingkat permintaan bambu sangat tinggi di dalam desa dan di luar desa. Pola distribusi bambu umumnya masyarakat langsung ke konsumen, atau sebaliknya konsumen langsung ke masyarakat yang memiliki bambu.

Madu salah satu produk unggulan non kayu dipasarkan melalui beberapa pola yaitu : masyarakat langsung kepada konsumen yang datang ke Sembalun Lawang sebagai wisatawan baik lokal maupun mancanegara, dititipkan di toko-toko, melalui pedagang pengumpul untuk selanjutnya dipasarkan di Mataram dan Bali sebagai produk khas Lombok. Sedangkan sumber daya yang lain seperti alang-alang dan kayu bakar dipasarkan melalui pedagang pengumpul karena sumber daya ini umumnya di pakai ditempat lain, seperti Selong dan Mataram, khusus alang-alang kemungkinan dipasarkan sampai ke Bali, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau konsumen kedua jenis sumber daya ini.

Secara umum jalur distribusi dan pemasaran hasil hutan di Desa Sembalun Lawang adalah sebagai berikut :



Gambar 12 Alur Distribusi Pemasaran Hasil Hutan oleh Responden Masyarakat Sembalun Lawang.

Berdasarkan Gambar 12, Kayu bangunan/balok memiliki pola distribusi dan pemasaran yang “terselubung” dan transaksi dilakukan secara diam-diam, karena pengambilan kayu bangunan dalam kawasan hutan lindung sangat dilarang. Modus penjualan kayu bangunan ada dua yaitu ; masyarakat mencari konsumen melalui perantara (*calo/makelar*) dengan menawarkan produk kayu, atau sebaliknya, konsumen mencari masyarakat yang dianggap bisa dan mengetahui kondisi hutan, untuk selanjutnya diminta mengambil kayu di dalam hutan. Secara umum proses transaksi melewati perantara, karena keterbatasan akses informasi dan pergaulan yang dimiliki masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian untuk dapat menekan tingkat pengambilan kayu bangunan, maka “*oknum perantara*” yang harus dibersihkan. Selain itu jalur transportasi pengangkutan kayu harus diamankan, khususnya jalur ke arah Pesugulan dan ke arah Sambelia.

Nilai Hasil Hutan dan Lahan Hutan

Nilai yang dimaksud dalam bahasan ini adalah nilai barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan, sehingga dapat memberikan pendapatan. Davids dan Johnson (1983) dalam Bahrani (1999), membuat klasifikasi nilai menurut bagaimana cara penilaian atau penentuan besar nilai dilakukan dan salah satu kelompok nilai adalah nilai pasar. Dari konsep ekonomi bahwa kegunaan, kepuasan atau kesenangan yang diperoleh individu atau masyarakat tidak hanya

terbatas pada barang dan jasa yang diperoleh melalui transaksi, akan tetapi semua barang dan jasa yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi individu atau masyarakat (Bahruni, 1999).

Hasil penelitian terhadap masyarakat responden dari ketiga desa dapat diketahui nilai hasil hutan dan lahan hutan yang diambil oleh masyarakat sangat bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya terhadap jenis sumberdaya yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain : kondisi geografis desa, jarak desa dengan kota sebagai tempat konsumen dan tersedianya sarana transportasi.

Tabel 12 Nilai Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Responden Masyarakat Desa Pengadangan (Rp/tahun).

Desa	Jenis Pemanfaatan Kawasan				Lahan	Nilai Total
	Hasil Hutan					
	Jenis	Volume	Harga	Total		
Pengadangan	Buah-buahan	2250 kg	500	1.125.000		
	Kayu bakar	3125 ikat	4.000	12.500.000		
	Jamur/pakis	635 kg	2.500	1.587.500		
Jumlah				15.212.500	17.889.500	33.102.000
Loloan	Kayu Bakar	3060 ikat	2.500	7.650.000		
	Kemiri	656 kg	1.600	1.050.000		
Jumlah				8.700.000	34.447.550	43.147.550
Sembalun Lawang	Kayu Bakar	2590 ikat	3.000	7.770.000		
	Rumput	2860 karung	2.500	7.150.000		
	Alang-alang	460 ikat	5.000	2.300.000		
	Madu	40 liter	75.000	3.000.000		
	Kayu Bangunan	15 M3	750.000	11.250.000		
Jumlah				31.470.000	7.970.000	39.440.000

Desa Pengadangan

Responden masyarakat Desa Pengadangan mengambil hasil hutan berupa kayu bakar, buah-buahan (nangka) dan jamur/pakis. Dari ketiga jenis sumberdaya tersebut pengambilan kayu bakar menempati urutan pertama dalam besar volume dan nilainya. Kayu bakar diambil untuk diperjualbelikan. Permintaan kayu bakar sangat tinggi baik di dalam lingkungan desa maupun di luar desa. Letak Desa Pengadangan yang dekat kota dengan sarana jalan yang baik serta kondisi geografis yang relatif datar, menyebabkan harga jual kayu bakar menjadi tinggi yaitu Rp 4000/ikat, karena pedagang pengumpul tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar untuk sampai ke konsumen. Volume pengambilan kayu bakar \pm 3125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ikat pertahun, dengan nilai Rp 12.500.000. Rata-rata pendapatan responden dari pengambilan kayu bakar adalah Rp 892.857.

Jamur/pakis diambil oleh masyarakat untuk dikonsumsi sendiri, kecuali pada musin hujan dimana ketersediaannya di dalam hutan melimpah, maka sebagian dijual. Harga jamur/pakis Rp 2500/kg, volume pengambilan 635 kg sehingga nilai jamur/pakis yang diambil masyarakat selama setahun Rp 1.587.500 dengan rata-rata pendapatan Rp 264.583. Buah-buahan yang sering dimabil adalah nangka muda, tujuannya untuk diperjualbelikan sebagai bahan sayuran. Buah nangka dijual dengan harga Rp 500/kg. Volume pengambilan selama setahun \pm 2250 kg, maka nilai sumberdaya buah nangka yang diambil masyarakat Rp 1.125.000 dengan rata-rata pendapatan Rp 375.000/responden.

Nilai dari ketiga jenis sumberdaya hasil hutan yang dimanfaatkan masyarakat setiap tahun adalah Rp 15.212.500. Sedangkan nilai dari pemanfaatan lahan hutan dalam bentuk kebun buah-buahan dan kebun tanaman industri adalah alpukat \pm 3109 kg, kopi \pm 945 kg dan cengkeh \pm 1250 kg. Harga dari komoditi tersebut ditingkat petani adalah alpukat Rp 3000/kg, kopi Rp 4500/kg dan cengkeh Rp 2500/kg. Sehingga nilai dari pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat adalah \pm Rp 17.889.500. Dengan demikian nilai total dari pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat adalah Rp 33.102.000.

Desa Loloan

Responden masyarakat Desa Loloan memanfaatkan hasil hutan dalam bentuk kayu bakar dan buah kemiri. Volume kayu bakar diambil masyarakat responden adalah \pm 3060 ikat/tahun. Jika harga kayu bakar ditetapkan dari kesediaan masyarakat menjual kayu bakar seharga Rp 2500/ikat, maka nilai sumberdaya kayu bakar yang diambil masyarakat adalah Rp 7.650.000/tahun dengan rata-rata pemanfaatan Rp 450.000/tahun. Sumberdaya hasil hutan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah buah kemiri. Volume pengambilan kemiri mencapai \pm 656 kg, dengan harga Rp 1600/kg, maka nilai sumberdaya buah kemiri yang diambil Rp 1.050.000 dengan rata-rata pendapatan responden dari mengambil kemiri adalah Rp 262.500/tahun. Sehingga total nilai hasil hutan yang diambil masyarakat responden Rp 8.700.000.



Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa, masyarakat Desa Loloan menggunakan lahan hutan untuk kegiatan pertanian, seperti menanam padi ladang, jagung, pisang dan beberapa tanaman perkebunan. Produksi padi ladang mencapai ± 12.04 ton dengan harga gabah Rp 1200/kg, maka nilai produksi dari sektor padi ladang adalah Rp 14.448.000, jagung 12,21 ton dengan harga Rp 350/kg bernilai Rp 4.273.500. Sektor perkebunan berupa pisang 995 tandan, harga Rp 5000/tandan senilai Rp 4.975.000, kakao 3500 kg harga Rp 2500/kg senilai Rp 8.750.000 dan kopi 500 kg harga Rp 4000/kg senilai Rp 2.000.000. Total nilai dari pemanfaatan lahan hutan adalah Rp 34.447.550. Dengan demikian total nilai pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat responden adalah Rp 43.147.550/tahun.

Desa Sembalun Lawang

Responden masyarakat Sembalun Lawang mengambil sumberdaya dari kawasan hutan paling banyak jenisnya yaitu kayu bakar, kayu bangunan, rumput, alang-alang, madu. Nilai dari sumberdaya tersebut adalah kayu bakar Rp.3000/ikat dengan volume 2590 ikat senilai Rp 7.770.000, kayu bangunan dengan volume 15 m³ senilai Rp 11.250.000, rumput dengan volume 2860 karung senilai Rp 7.150.000, alang-alang dengan volume 460 ikat senilai Rp 2.300.000, madu dengan volume 40 liter senilai Rp 3.000.000. Sehingga total nilai dari pengambilan hasil hutan Rp 31.470.000. Nilai hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk kebun bambu adalah Rp 7.970.000. Sehingga nilai total sumber daya hutan yang diperoleh masyarakat dari memanfaatkan lahan hutan dan mengambil hasil hutan adalah Rp 39.440.000/tahun

Kontribusi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil rekapitulasi pendapatan responden (Lampiran 8, 9, 10), maka dapat diketahui kontribusi per jenis hasil hutan dan pemanfaatan lahan hutan terhadap pendapatan total masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tabel 13 Kontribusi Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Responden Masyarakat Desa Penelitian (Rp/tahun).

Desa/Jenis Sumberdaya	Rata-rata Pendapatan Dari Pemanfaatan Hutan (Rp/th)	Rata-rata Pendapatan Total (Rp/th)	Kontribusi (%)
Pengadangan			
a. Hasil Hutan			
Buah-buahan	375.000	4.862.133	1.54
Kayu Bakar	892.857		17.14
Jamur/pakis	264.583		2.18
b. Lahan Hutan	1.376.115		24.53
Jumlah			45.39
Loloan			
a. Hasil Hutan			
Kayu Bakar	450.000	3655735	12,31
Kemiri	262.500		1.69
b. Lahan Hutan			
Kebun	683.823		18,71
Tanaman Pangan	1342500		36,72
Jumlah			69.43
Semalun Lawang			
a. Hasil Hutan			
Kayu Bakar	408.947	4.262.632	9,59
Rumput	550.000		8.83
Alang-alang	575.000		2.84
Madu	600.000		3.70
Kayu Bangunan	2.250.000		13.89
b. Lahan Hutan	613.077		9.84
Jumlah			84,69

Kontribusi pemanfaatan sumberdaya hutan terhadap pendapatan pokok masyarakat menunjukkan besarnya peranan kawasan hutan dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Data ini sangat penting untuk diketahui khususnya bagi pengelola kawasan konservasi dan Pemerintah sebelum mengambil suatu kebijakan tentang masyarakat sekitar hutan. Data kontribusi di padukan dengan data potensi lain yang dimiliki masyarakat akan memberikan pemahaman yang lengkap tentang kondisi masyarakat tersebut, dengan demikian diharapkan akan lahir suatu kebijakan yang lebih mendekati kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.

Desa Pengadangan

Kontribusi per jenis untuk hasil hutan untuk Desa Pengadangan menunjukkan bahwa kayu bakar menjadi sumberdaya paling banyak diambil

(17,14%) disusul jamur/pakis (2,18%) dan yang paling sedikit adalah buah-buahan (1,54%). Sebagaimana hasil wawancara dengan petugas keamanan hutan, bahwa tekanan yang paling dikuatirkan dari masyarakat adalah pengambilan kayu bakar. Karena intensitas dan volume pengambilan kayu bakar sangat tinggi akan merusak kawasan hutan dalam bentuk pengudulan hutan dan merusak anakan pohon yang sulit untuk dipulihkan. Diantara ketiga sumberdaya hasil hutan yang diambil hanya kayu bakar yang dilarang, sedangkan buah-buahan dan jamur/pakis tidak dilarang akan tetapi ketergantungan masyarakat akan jamur/pakis sangat kecil, karena ketersediaan sumberdaya ini juga terbatas dan pada umumnya masyarakat mengambil jamur/pakis bukan tujuan utama.

Jika pengambilan kayu bakar mau dihentikan, maka sebelumnya pemerintah dan instansi terkait memikirkan sumber pendapatan pengganti apalagi kayu bakar memberikan kontribusi 17,14%. Hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa bukannya *tidak* mengetahui bahwa mengambil kayu bakar sedemikian besar merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat mendatangkan bencana seperti longsor dan banjir, namun tetap dilakukan karena tidak punya alternatif lapangan kerja. Beberapa program bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah guna mengalihkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan seperti program pemberian sapi bergulir, pelatihan pembuatan kain tenun ikat, pelatihan budidaya lebah madu, pelatihan pembuatan dodol dan keripik nangka. Semua program ini jika di lihat seharusnya dapat menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, dampak dari program tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh program tidak ditindaklanjuti dengan program pendampingan dan program pemasaran. Akibatnya program cenderung menciptakan ketergantungan dan bukan kemandirian (Krisnamuti 2002). Disisi lain masyarakat memandang setiap program hanya bersifat sesaat dan lebih sebagai kegiatan pembagian uang. Wawancara dengan aparat pemerintah menyebutkan bahwa kegagalan program bantuan mengurangi ketergantungan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan karena kecilnya alokasi dana yang tersedia setiap tahun untuk setiap program dan banyaknya masyarakat setiap desa yang memerlukan bantuan.





Desa Loloan

Kontribusi pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan di Desa Loloan jika dilihat dari kontribusinya tergolong paling tinggi dibandingkan dengan dua desa lainnya. Pola pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat dengan cara bertani di dalam kawasan hutan memberikan kontribusi sebesar 55,43%. Pemanfaatan lahan ini dianggap perambahan hutan oleh pemerintah. Data Dinas kehutanan Lombok Barat menyebutkan bahwa tahun 2004, terjadi perambahan hutan seluas 800 ha di Sesaot dan Bayan (Loloan) dalam kurung waktu yang sama di NTB terjadi perambahan hutan seluas 2813,55 ha dengan taksiran kerugian mencapai Rp 436.197.114 (Dinas Kehutanan NTB 2004).

Sedangkan kontribusi dari pengambilan hasil hutan sebesar 14,00%. Jenis sumber daya yang diambil adalah kayu bakar (12,31%) dan kemiri (1,69%). Pengambilan kayu bakar termasuk dalam pemanfaatan lahan hutan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada waktu masyarakat membabat lahan untuk persiapan tanam padi maka secara bersamaan juga mengambil kayu bakar. Di samping itu pengambilan kayu bakar hanya sebatas untuk keperluan sendiri (*subsisten*). Hasil hutan lain yang diambil adalah kemiri, walaupun jumlah tidak banyak, karena ketersediaannya dalam hutan sangat terbatas. Kemiri termasuk sumber daya yang tidak dilarang pengambilannya.

Desa Sembalun Lawang

Kontribusi dari pemanfaatan sumberdaya hutan di Sembalun Lawang mencapai 48,69%. Hasil hutan yang paling tinggi kontribusinya adalah kayu banyunan sebesar 13,89%, ini disebabkan harga kayu bangunan sangat tinggi, walaupun volume pengambilannya kecil. Berikutnya kayu bakar dengan kontribusi sebesar 9,59%. Sehingga dari kedua jenis hasil hutan ini (kayu bangunan dan kayu bakar) termasuk kategori dilarang pengambilannya, menyumbang kontribusi sebesar 23,46%. Jenis hasil hutan yang lain dimanfaatkan masyarakat dan termasuk kategori tidak dilarang pengambilannya adalah rumput dengan kontribusi sebesar 8,83%, madu 3,70% dan alang-alang 2,84%. Khusus untuk madu meskipun kontribusinya masih relatif kecil, namun memiliki prospek yang baik/menarik untuk dikembangkan, karena Desa Sembalun Lawang merupakan jalur utama menuju



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kawasan puncak rinjani dan akan dijadikan pusat pariwisata rinjani. Oleh karena itu Desa Sembalun Lawang memegang peranan strategis dalam pengelolaan pariwisata rinjani.

Permasalahan pokok yang muncul berkenaan dengan pengembangan pariwisata pada desa ini adalah masih rendahnya kesempatan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata (Hartina 2001). Hal ini disebabkan masyarakat belum siap untuk beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor pariwisata. Sehingga dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu kelompok yang masih bergantung hidupnya pada sektor pertanian dan kelompok masyarakat yang bergantung hidupnya pada sektor pariwisata rinjani (Gambar 13). Kedua kelompok masyarakat ini memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya melestarikan kawasan hutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat ada yang merusak hutan dalam bentuk penebangan liar dan pengambilan kayu bakar dalam jumlah besar. Permasalahan lain adalah adanya tuntutan masyarakat terhadap kontribusi yang diperoleh dari kegiatan pariwisata TNGR. Masyarakat dalam hal ini menginginkan kontribusi yang lebih tinggi dari yang diterima sebelumnya.

Kondisi ini sebagian menimbulkan persepsi negatif pada masyarakat yang kurang memiliki akses pada kegiatan pariwisata. Jika kondisi ini terus berlangsung tentunya merupakan potensi konflik yang sangat serius dimasa mendatang. Dengan demikian maka harus lebih digali kembali peluang-peluang yang dapat dilakukan guna lebih mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar secara lebih luas. Untuk itu seluruh stakeholder yang terkait perlu merumuskan secara bersama peluang-peluang pengelolaan pariwisata TNGR secara partisipatif dan merumuskan mekanisme koordinasi serta intermediasi sehingga manfaat yang diperoleh dapat dirasakan secara bersama dan merata.

Perbandingan Kontribusi Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Luar Kawasan Hutan

Berdasarkan kontribusi pemanfaatan kawasan hutan (Tabel 13) dan tabel rekapitulasi pendapatan responden (Lampiran 8, 9, 10) diketahui perbandingan

antara kontribusi pendapatan dari pemanfaatan kawasan hutan dengan pendapatan di luar kawasan hutan

Tabel 14 Kontribusi Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan terhadap Pendapatan Responden Masyarakat Desa Penelitian.

Desa	Pemanfaatan Kawasan Hutan (%)			Luar Kawasan Hutan (%)
	Hasil Hutan	Lahan Hutan	Total	
Pengadangan	20.86	24.53	45.39	54.61
Loloan	14.00	55.43	69.43	30.57
Sembalun Lawang	38.85	9.84	48.69	51.31
Rata-Rata	24.57	29.93	54.50	45.50

Rata-rata pendapatan responden dari kawasan hutan (54,50%) sedikit lebih besar daripada di luar hutan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan masih tinggi. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik sangat berpotensi menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan. Demikian pula jika penanganan yang diberikan kurang tepat, maka berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Sedangkan pendapatan dari luar kawasan hutan menyumbang kontribusi sebesar 45,50%.

Perbandingan kontribusi pendapatan dari kawasan hutan dengan luar kawasan hutan di Desa Pengadangan menunjukkan bahwa kontribusi dari luar kawasan hutan lebih tinggi (54,61%) daripada kontribusi dari dalam hutan (45,39%). Pendapatan dari luar hutan adalah pendapatan dari sektor pertanian (34,21%) dan pendapatan sektor jasa terdiri dari buruh *galian C*, tukang ojek (20,40%). Perbedaan yang tidak terlalu besar ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kedua desa lainnya.

Kontribusi pendapatan masyarakat Desa Loloan dari kawasan hutan sebesar 69,43% jauh lebih besar daripada pendapatan di luar kawasan hutan sebesar 30,37%. Data ini menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Pendapatan di luar hutan terdiri pendapatan sebagai petani penggarap, buruh tani, dan tukang ojek. Pendapatan dari luar kawasan tinggi disumbang dari sektor perkebunan jambu mente (20,7%) yang luasnya mencapai 412,9 ha dan menjadi salah satu sentra produksi biji mente. Produksi biji mente Kabupaten Lombok Barat 3975 ton/tahun yang diproduksi dari Kecamatan Bayan,

Sekotong dan Gangga (Kompas 2005). Sektor jasa terdiri dari tukang ojek dan pedagang pengumpul memberikan kontribusi sebesar 10,30%.

Perbandingan kontribusi pendapatan masyarakat di Desa Sembalun Lawang antara kawasan hutan dan luar kawasan hutan, menunjukkan bahwa kontribusi dari luar kawasan hutan sedikit lebih tinggi (51,31%) daripada pendapatan dari dalam kawasan hutan (48,69%). Pendapatan dari luar kawasan hutan berasal dari sektor pertanian sebesar 31,17% dan sektor jasa (tukang ojek, dagang) sebesar 20,13%.



Gambar 13. Interaksi Masyarakat dengan TNGR Sektor Pariwisata

Sembalun Lawang sebagai salah satu pintu masuk kawasan Gunung Rinjani sangat ramai dilalui wisatawan lokal dan mancanegara. Dengan adanya wisatan yang berkunjung ke Gunung Rinjani melalui desa Sembalun Lawang diharapkan masyarakat dapat mengambil peran yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekitar. Sekarang ini peran masyarakat setempat masih sebatas *porter* (gambar 13).

Permasalahan yang ditemukan dari ketiga desa relatif sama yaitu terbatasnya sumber daya dan lapangan pekerjaan di luar kawasan hutan, di samping itu walaupun ada pekerjaan yang tersedia, kualifikasi masyarakat sekitar hutan tidak mencukupi untuk itu, sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, sehingga kurang dapat mengembangkan potensi yang terdapat dalam desa tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.